

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi isu pemanasan global dan krisis iklim. Selain itu, dalam pendahuluan juga akan dijelaskan tujuan penelitian ini serta rumusan masalah. Kemudian selain latar belakang, tujuan penelitian dan rumusan masalah, dalam bab ini juga menerangkan kerangka pemikiran yang terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia internasional sedang ramai membicarakan isu Pemanasan Global (*Global Warming*) dan Krisis Iklim (*Climate Crisis*). Ulasan mengenai pemanasan global, bahayanya, serta solusi untuk menghambat peningkatannya belakangan ini kembali gencar dibicarakan dan diulas oleh berbagai media di dunia. Keprihatinan akan kondisi perubahan iklim yang semakin buruk memang menjadi perhatian serius negara-negara dunia. Berbagai upaya bersama telah dilakukan untuk membahas penyebab perubahan iklim, pengaruhnya bagi kelangsungan hidup manusia, dan cara menanggulangnya.¹

Dimulai dari Konferensi I Iklim Dunia yang diadakan Badan Meteorologi Dunia (*WMO–World Meteorological Organization*) pada tahun 1979, pembentukan Panel Antar-pemerintah Mengenai Perubahan Iklim (IPCC

¹ *Pemanasan Global : Isu dan Pemecahan*, diakses dari www.top1headline.com, pada tanggal 31 Mei 2010, pukul 09.00 WIB

/Intergovernmental Panel on Climate Change), hingga pembentukan *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) melalui Majelis umum PBB yang menghasilkan kesepakatan diselenggarakannya konvensi mengenai perubahan iklim. Konvensi yang diwujudkan dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (*UNFCCC/United Nations Framework Convention on Climate Change*), biasa disebut Konvensi Perubahan Iklim, yang ditetapkan pada tahun 1992 sebagai salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazil. Selanjutnya, negara-negara dunia mengupayakan Protokol Kyoto tahun 1997, hingga pembentukan badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (*COP /Conference of the Parties*) yang membantu UNFCCC dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.²

Menurut *International Panel on Climate Change* (IPCC), yang merupakan satu badan PBB yang terdiri dari 1.300 ilmuwan terbaik dari seluruh dunia, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Gas rumah kaca adalah jenis-jenis gas di atmosfer bumi (seperti Karbon dioksida /CO₂, metana/CH₄, Nitrogen Oksida/ NO) yang bertugas menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat. Disebut gas rumah kaca karena sistem kerja gas-gas tersebut di atmosfer bumi mirip dengan cara kerja rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalamnya agar suhu di dalam rumah kaca tetap hangat, dengan begitu

² *Ibid*

tanaman di dalamnya pun akan dapat tumbuh dengan baik karena memiliki panas matahari yang cukup. Proses yang membuat temperatur bumi tetap hangat ini disebut sebagai efek rumah kaca.³

Kerjasama multilateral diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas rumah kaca. Begitu pun juga dengan Jepang sebagai negara maju, dimana Pemerintah Jepang sangat konsisten dengan krisis lingkungan. Multi krisis yang melanda masyarakat global telah memaksa negara-negara di dunia mencari jalan untuk mengatasinya. Terlebih mengingat dampaknya yang mengglobal dan kompleks (saling mempengaruhi), sehingga membuat semua pihak tidak peduli negara maju ataupun berkembang harus bekerja sama. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan kompleks, tidak ada satu negara pun yang kebal. Apabila tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim akan membalikkan kemajuan pembangunan dan membahayakan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.⁴

Lingkungan hidup juga erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan suatu negara, karena berhubungan dengan *national interest* negara tersebut. Lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi negara melonjak naik, serta munculnya krisis lingkungan hidup yang merupakan produk kapitalisme karena konsumsi dan produksi yang berlebihan. Negara maju adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap krisis lingkungan, melalui pola produksi dan konsumsi yang lebih mengutamakan pertimbangan jangka pendek, yakni penggunaan GNP per kapita sebagai indikator

³ *Dampak Pemanasan Global*, diakses dari www.walhi.com, pada tanggal 1 Juni 2010, pukul 09.00 WIB

⁴ World Bank, 2010, *Pembangunan dan Perubahan Iklim*, Jakarta, Salemba Empat, hal 1

sukses sebuah negara dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian mendorong negara-negara maju untuk terus meningkatkan industrialisasi di dalam negeri yang telah menerima keuntungan luar biasa dari eksploitasi sumber daya alam.

Negara-negara maju merupakan negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca yang terbesar, diantaranya adalah negara Jepang dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut merupakan negara maju dengan tingkat industrialisasi yang tinggi, akan tetapi kedua negara tersebut memiliki sikap yang berbeda terhadap isu lingkungan global. Jepang sebagai negara maju ikut berperan aktif dalam berbagai konvensi di bidang lingkungan hidup, hal ini ditunjukkan dengan Jepang berperan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Protokol Kyoto pada tahun 1997 serta ikut memberikan angka target penurunan emisi, ikut serta dan berpartisipasi dalam berbagai konvensi di bidang isu lingkungan global diantaranya ANMC21, Cop 13 di Bali dan Cop 15 di Kopenhagen.

Amerika Serikat tidak menunjukkan sikap yang pro aktif terhadap krisis lingkungan global, hal tersebut ditunjukkan dengan Amerika Serikat memberi keputusan untuk menarik dukungannya terhadap Protokol Kyoto. Sikap tidak pro aktif yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen Jepang dalam mengatasi krisis lingkungan global. Amerika Serikat sebagai negara industri maju sekaligus penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca belum mau meratifikasi Protokol Kyoto karena dianggap masih merugikan perekonomian dan perindustrian Amerika Serikat.

Dalam catatan majalah *National Geographic* bulan Oktober 2007 menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh negara maju seperti Amerika Serikat sudah mencapai 50%.⁵ Pemaksaan pengurangan emisi akan menyebabkan produktivitas industri Amerika Serikat menurun, karena emisi merupakan produk sampingan dari hasil produksi industri-industri. Pengurangan emisi berarti sama dengan mengurangi kegiatan produksi itu sendiri. Pengurangan kegiatan produksi tentu akan berdampak buruk pada perekonomian Amerika Serikat.⁶

Amerika Serikat hingga saat ini tidak berkeinginan meratifikasi Protokol Kyoto 1997, para delegasi Amerika Serikat pun sering menghambat berbagai perundingan internasional dan kadang-kadang memaksakan kehendak melalui berbagai cara seperti tidak membayar iuran. Presiden AS waktu itu George Bush menolak hadir, memberikan pendapat dalam sidang kemudian menghilang dan cara-cara lainnya. Dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan dengan arogan Presiden George Bush menyatakan ketidakinginannya untuk hadir dalam KTT tersebut dikarenakan kurang penting dan hanya mengutus Menteri Luar negeri waktu itu yaitu Collin Powell yang kemudian menghilang setelah mengucapkan pidatonya dan didemonstrasi oleh kalangan NGO. Dalam berbagai perundingan internasional pun Amerika Serikat melakukan diplomasi yang kadang-kadang menekan negara-negara tertentu, memberikan ancaman atau boikot dan lain-lain. Namun di sisi lain kebijakan luar

⁵ Rusbiantoro, Dadang, 2008, *Global Warming For Beginner*, Yogyakarta, Penerbit O2, hal 15

⁶ *Cabel News Network. Bush Firm Over Kyoto Stance*, diakses melalui <http://edition.cnn.com/2001/US/03/29/schroeder.bush/index.html>, diakses pada 15 Juli 2010, pukul 11.00 WIB

negari Amerika Serikat berkeinginan menjadi *leader* dengan menempatkan posisi-posisi yang menguntungkan kebijakan Amerika Serikat di suatu perundingan.⁷

Dalam beberapa perundingan internasional, Amerika Serikat tidak menjadi anggota (*party*) suatu konvensi internasional dan hanya bertindak sebagai negara pengamat (*observer state*), namun kadang-kadang pengaruhnya cukup besar. Dalam COP Basel Convention 1989, Amerika Serikat banyak berperan dalam memberikan usulan dan mempengaruhi negara-negara berkembang untuk mengikuti kebijakan Amerika Serikat dalam limbah B3 walaupun hanya sebagai negara pengamat (*observer state*) saja.

Dalam COP ke 13 UNFCCC, Amerika Serikat berusaha menghambat rancangan Peta Jalan Bali (*Bali Road Map/BRM*) dengan dukungan Jepang dan Kanada namun setelah itu Amerika Serikat ditinggal oleh Kanada dan Jepang dikarenakan kedua negara tersebut lebih realistis memandang *Bali Road Map* dengan persyaratan tanpa angka target sehingga posisi Amerika Serikat menjadi sulit dan terpaksa harus menyetujui *Bali Road Map* daripada dituduh menghambat jalannya persidangan.⁸ Perbedaan sikap antara Jepang dan Amerika Serikat tersebut menunjukkan perbedaan keseriusan masing-masing negara dalam menanggulangi isu lingkungan global dalam hal ini krisis iklim padahal kedua negara merupakan negara maju yang sama-sama menggantungkan energinya dari negara lain.

⁷ Pramudianto, Andreas, 2008, *Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta*, Jakarta, UI Press, hal 225-226

⁸ *Ibid*, hal 187

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Jepang mengikuti kerjasama multilateral dalam isu lingkungan global.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa Jepang mengikuti kerjasama multilateral dalam isu lingkungan global?

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian diperlukan untuk membahas suatu permasalahan, teori ini dibangun oleh beberapa konsep, dimana konsep-konsep tersebut harus saling dihubungkan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah :

1. Teori Sistem Politik

Suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yaitu keputusan-keputusan otoritatif.⁹

David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam pengalokasian daripada nilai-nilai tersebut bersifat paksaan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai

⁹ Mohtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 6

seperangkat yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.¹⁰

Hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem politik. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Pengaruh lingkungan, baik yang intersosietal maupun yang ekstrasosietal mengalir masuk ke dalam sistem politik sebagai input baik yang berupa tuntutan-tuntutan (*demands*) maupun sebagai dukungan (*supports*). Hasil daripada sistem politik disebut output ini mengalir ke masyarakat atau mungkin kembali lagi masuk mempengaruhi sistem politik sebagai input.

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara ajeg. Tanpa input sistem itu tidak akan dapat berfungsi, tanpa output tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Dalam hubungan ini yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasi input-input dan kekuatan-kekuatan yang membentuk dan merubah input-input tersebut, menelusuri proses-proses yang mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-otput, menggambarkan kondisi-kondisi umum yang dapat memelihara proses-proses tersebut, dan menarik hubungan antara output-output dengan input-input berikutnya dalam sistem tersebut.¹¹

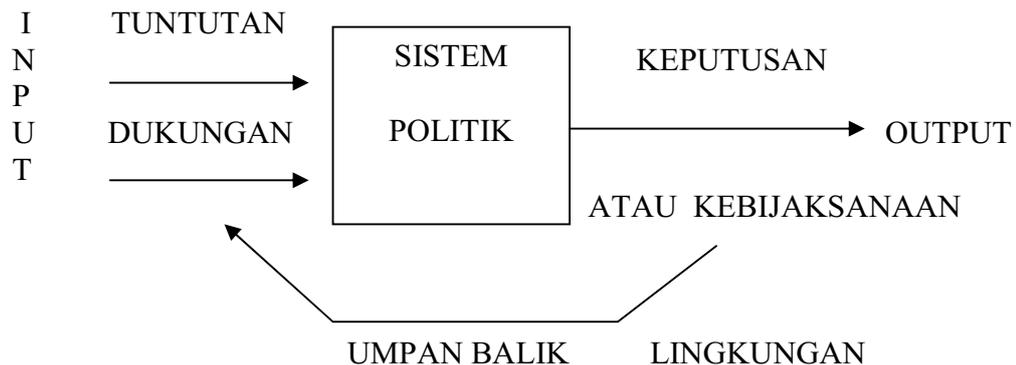
Sistem menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungannya. Ada dua jenis pokok input-input suatu sistem

¹⁰ David Easton, 1984, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Bina Aksara, hal 86

¹¹ Mohtar Mas'ood, *opcit*, hal 6

politik yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang akan memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem tersebut dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem tersebut.¹²

LINGKUNGAN



Gambar 1.1 Teori Sistem Politik

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dalam setiap sistem yang berjalan, secara khas tuntutan-tuntutan bisa timbul dengan tujuan merubah hubungan-hubungan politis di antara anggota-anggota itu sendiri, sebagai akibat dari ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu. Misalnya dalam suatu sistem politik berdasar perwakilan, dimana perwakilan setara merupakan norma politik yang penting, mungkin timbul tuntutan-tuntutan menyeimbangkan perwakilan di antara distrik-distrik pemilihan kota dan desa. Juga tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin politik formal, perubahan cara amandemen konstitusi. Juga tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin formal, perubahan cara amandemen konstitusi, dan tuntutan lain serupa mungkin merupakan tuntutan-tuntutan yang merupakan perwujudan inspirasi di dalam politik.

¹² *Ibid*, hal 8

Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir, yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangikan sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Input ini disebut dukungan (*support*). Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.¹³

Output dari suatu sistem politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Output-output yang berwujud keputusan-keputusan politik, merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem tersebut. Karena output-output khas dari suatu sistem adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan, maka pada pemerintahan terletak tanggungjawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.¹⁴ Agar suatu sistem politik tetap berfungsi dengan tertib, dan tidak hancur, anggota-anggota sistem tersebut harus memiliki harapan, dasar yang sama dalam hal patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang harus diterapkan untuk membuat penilaian politik, cara seseorang berpikir tentang berbagai masalah politik, dan cara anggota-anggota sistem memandang dan menafsirkan gejala politik.¹⁵

¹³ *Ibid*, hal 11

¹⁴ *Ibid*, hal 16-17

¹⁵ *Ibid*, hal 19

Dengan demikian urgensi diambilnya kebijakan Pemerintah Jepang untuk mengadakan perjanjian multilateral dalam isu lingkungan global adalah sebagai akibat dari semakin meluasnya efek dari global warming yang melanda dunia ini. Oleh karenanya, Pemerintah Jepang berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari krisis lingkungan global tersebut. Sebagai input, tuntutan-tuntutan yang berasal dari masyarakat Jepang sendiri yang memang sudah mempunyai kebiasaan untuk menjaga lingkungan hidup sekitar, sehingga Jepang dikenal sebagai negara yang bersih dan asri. Bahkan di Jepang sendiri sudah mempunyai Undang-Undang Sampah. Demikian juga tuntutan dari negara-negara berkembang, negara-negara maju dan NGO yang menginginkan untuk negara maju seperti Jepang agar aktif untuk ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi efek dari pencemaran lingkungan secara global karena negara-negara maju dengan tingkat industrialisasi yang tinggi yang banyak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

Input yang diterima pemerintah dan masuk ke dalam sistem politik akhirnya menghasilkan output yang berupa kebijakan dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjalin perjanjian multilateral dengan negara-negara lain yang berkaitan dengan isu lingkungan global diantaranya Protokol Kyoto, Cop 13, Cop 15, ANMC21 (*The Asian Network of Major Cities 21*).

1. Konsep Diplomasi Lingkungan

Menurut Andreas Pramudianto yang dimaksud dengan diplomasi lingkungan (*enviromental diplomacy*) adalah :¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hal 28

“ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara”.

Peran diplomasi lingkungan hidup telah berkembang dikarenakan meningkatnya dinamika dalam hubungan internasional yang semakin kompleks. Diplomasi lingkungan hidup dalam prakteknya telah mengalami perkembangan pesat. Dinamika perundingan serta peran suatu negara akan dapat menentukan program lingkungan hidup global di kemudian hari. Peran para pihak dalam diplomasi lingkungan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan diplomasi lingkungan.

Salah satu tujuan pokok yang dicapai dalam diplomasi lingkungan di antaranya adalah berupaya untuk mencoba membentuk, menciptakan, memperbaiki dan menerapkan norma hukum lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan di antara negara.

Diplomasi kini bukan menjadi arena yang eksklusif lagi bagi suatu negara dikarenakan mulai banyaknya entitas bukan negara yang terlibat dalam perundingan internasional khususnya di bidang lingkungan hidup. Setelah banyaknya kesepakatan global mengenai lingkungan hidup, tampak sudah tidak dapat dihindari lagi bahwa hampir semua perundingan internasional telah menekankan pentingnya perhatian terhadap lingkungan hidup. Berbagai perundingan untuk membentuk suatu regulasi baru sangat penting. Hal ini juga

menunjukkan bagaimana keseimbangan dunia akan ditentukan juga dengan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat. Pentingnya diplomasi lingkungan di antaranya adalah :¹⁷

- 1) Perundingan lingkungan hidup di kemudian hari akan terus berlanjut
- 2) Perundingan tersebut tampaknya belum akan berakhir sepanjang permasalahan lingkungan belum terselesaikan
- 3) Meningkatnya kerusakan lingkungan global, telah menuntut negara-negara untuk terlibat dalam menangani permasalahan ini
- 4) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia akan berdampak luas khususnya bagi lingkungan hidup
- 5) Penipisan sumber daya alam dan meningkatnya jumlah penduduk dunia akan meningkatkan konflik seperti isu energi dan pangan
- 6) Sistem, perangkat kelembagaan serta norma-norma akan terus berkembang dan dapat meluas di bidang lingkungan hidup
- 7) Tanggung jawab dan kepedulian negara dan umat manusia terhadap lingkungan global akan semakin meningkat demi keberlanjutan kehidupan planet bumi.

Jepang dalam menjalin perjanjian multilateral dalam isu lingkungan global melakukan diplomasi lingkungan kepada negara-negara yang juga mengupayakan pencegahan dan penanganan terhadap krisis lingkungan hidup. Diplomasi lingkungan yang dilakukan Jepang tersebut merupakan upaya dalam rangka untuk

¹⁷ *Ibid*, hal 300

bersama-sama dengan negara lain mengatasi isu lingkungan global yang melanda negara-negara maju maupun negara-negara berkembang lainnya.

E. Hipotesa

Jepang mengikuti kerjasama multilateral dalam isu lingkungan global karena adanya dukungan berupa Jepang telah mempunyai Undang-Undang Konservasi Energi, dan tuntutan dari pihak eksternal yaitu adanya tuntutan dari negara-negara berkembang (AOSIS).

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif dengan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang didapat melalui buku, jurnal, artikel surat kabar, artikel majalah, website, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) kemudian setelah itu dilakukan proses pemilahan, pengkategorian, dan pemusatan pada data yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam hal penyajian data dilakukan dengan

menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil pemikiran akan perbandingan mengenai kenyataan di lapangan dengan teori berdasarkan data yang diperoleh.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka penulis berusaha memberikan batasan waktu agar tidak terlalu luas sehingga mudah untuk dipahami. Jangkauan penulisan dalam penelitian ini adalah antara tahun 2007-2009, dimana dalam rentang waktu tersebut Jepang mulai konsisten dalam mengatasi isu lingkungan global dengan mengadakan kerjasama multilateral di bidang lingkungan, diantaranya telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2007, mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-15 (atau disebut juga COP 15) yang dimulai sejak tanggal 07 Desember-18 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.

H. Sistematika Penulisan

Pada bab satu akan dijelaskan mengenai latar belakang mengenai Jepang mengadakan perjanjian multilateral dalam isu lingkungan global, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian

Pada bab dua dibahas mengenai tinjauan mengenai isu lingkungan global diantaranya adalah pengertian isu lingkungan global, macam-macam isu lingkungan global dan penanggulangan isu lingkungan global.

Bab tiga akan dibahas mengenai dukungan dari Pemerintah Jepang dan tuntutan dari negara berkembang (AOSIS)

Pada bab empat akan dibahas mengenai kerjasama multilateral yang terjadi karena adanya tuntutan dan dukungan dari berbagai pihak dalam isu lingkungan global diantaranya adalah ANMC21, Cop 3, Cop 13, Cop 15

Pada bab lima akan dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran penelitian.

Permasalahan mengenai lingkungan hidup telah menjadi isu global yang menimpa setiap Negara di dunia. Hal tersebut dialami oleh Jepang sebagai Negara yang banyak mengimpor bahan mentah dari Negara luar. Kebutuhan energi Jepang sangat bergantung kepada Negara lain, sehingga apabila terjadi krisis lingkungan global hal tersebut akan berdampak buruk bagi perekonomian Jepang.